SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip Dinamis dilingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu disusun pedomannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaiam Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip Dinamis dilingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu disusun pedomannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaiam Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu;
7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis;
b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan Pemerintah Daerah; dan
d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. klasifikasi arsip; dan
b. penetapan kode klasifikasi arsip.

BAB II
KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

(1) Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:
   a. fungsi fasilitatif; dan
   b. fungsi substantif.

(2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja Perangkat daerah.

(3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

Pasal 5

(1) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) meliputi:
   a. Umum;
   b. Pengawasan;
   c. Kepegawaian; dan
   d. Keuangan

(2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. 000 untuk kode masalah umum;
b. 100 untuk kode masalah Pemerintahan;
c. 200 untuk kode masalah Politik;
d. 300 untuk kode masalah Keamanan dan Ketertiban;
e. 400 untuk kode masalah Kesejahteraan;
f. 500 untuk kode masalah Perekonomian;
g. 600 untuk kode masalah Pekerjaan Umum;
h. 700 untuk kode masalah Pengawasan;
i. 800 untuk kode masalah Kepegawaian; dan
j. 900 untuk kode masalah Keuangan.

## BAB III
## PENETAPAN KODE KLASIFIKASI

### Pasal 6

(1) Penetapan kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b disusun menggunakan kode klasifikasi arsip berupa angka.

(2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. 000 untuk kode masalah umum;
b. 100 untuk kode masalah Pemerintahan;
c. 200 untuk kode masalah Politik;
d. 300 untuk kode masalah Keamanan dan Ketertiban;
e. 400 untuk kode masalah Kesejahteraan;
f. 500 untuk kode masalah Perekonomian;
g. 600 untuk kode masalah Pekerjaan Umum;
h. 700 untuk kode masalah Pengawasan;
i. 800 untuk kode masalah Kepegawaian; dan
j. 900 untuk kode masalah Keuangan.

(3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran naskah dinas, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.

### Pasal 7

Uraian penetapan kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Juli 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 28 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH.MM
NIP. 19731028 200003 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2026
TENTANG : PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP

## 00 UMUM

### 00.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

- 00.1.1 Telekomunikasi
- 00.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  - 00.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
  - 00.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
  - 00.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
- 00.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
  - 00.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
  - 00.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
  - 00.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
- 00.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor, antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya
- 00.1.5 Rapat pimpinan
- 00.1.6 Penyediaan Konsumsi
- 00.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas
  - 00.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
  - 00.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
  - 00.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
- 00.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
  - 00.1.8.1 Pertamanan/ Landscape
  - 00.1.8.2 Penghijauan
  - 00.1.8.3 Perbaikan Gedung
  - 00.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
  - 00.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
  - 00.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
- 00.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
  - 00.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan
  - 00.1.9.2 Pemasangan
- 00.1.10 Ketertiban dan Keamanan
  - 00.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
  - 00.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan
- 00.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
- 00.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya

### 00.2 PERLENGKAPAN

- 00.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan
  - 00.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
  - 00.2.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
- 00.2.2 Pemeliharaan Peralatan kantor
  - 00.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor
  - 00.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor

00.2.3 Distribusi
- 00.2.3.1 Barang habis pakai
- 00.2.3.2 Barang milik daerah

00.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan

00.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

**00.3 PENGADAAN**

00.3.1 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

00.3.2 Pengadaan Langsung, antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaankontrak

00.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang, antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak

00.3.4 Swakelola, antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

00.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan, antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa

00.3.6 Monitoring dan Evaluasi, antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi

**00.4 PERPUSTAKAAN**

00.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

00.4.2 Deposit Bahan Pustaka
- 00.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
- 00.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
- 00.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional
- 00.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
- 00.4.2.5 Bibliografi dan Katalog

00.4.3 Koleksi Pustaka
- 00.4.3.1 Pembelian
- 00.4.3.2 Hibah
- 00.4.3.3 Hadiah
- 00.4.3.4 Tukar Menukar
- 00.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR
- 00.4.3.6 Terbitan Internal
- 00.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus
- 00.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)

00.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka
00.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi
00.4.6 Layanan Perpustakaan
- 00.4.6.1 Keanggotaan
- 00.4.6.2 Peminjaman
- 00.4.6.3 Pengembangan gemar baca

00.4.7 Kerjasama Perpustakaan
- 00.4.7.1 MoU
- 00.4.7.2 Perjanjian kerjasama
- 00.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional

00.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
- 00.4.8.1 Pengembangan situs web
- 00.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
- 00.4.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan
- 00.4.8.4 Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital

00.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
00.4.10 Konservasi
- 00.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan
- 00.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan
- 00.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan

00.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
00.4.12 Transformasi Digital
00.4.13 Kurasi Digital
00.4.14 Pengembangan Perpustakaan
- 00.4.14.1 Perpustakaan Umum
- 00.4.14.2 Perpustakaan Khusus
- 00.4.14.3 Perpustakaan Sekolah
- 00.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi

**00.5 KEARSIPAN**

00.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
00.5.2 Pembinaan Kearsipan
- 00.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
- 00.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis
- 00.5.2.3 Penilaian Arsiparis
- 00.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
- 00.5.2.5 Data Base Arsiparis
- 00.5.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan
- 00.5.2.7 Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi

00.5.2.8 Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi

00.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan

00.5.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)

00.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI

00.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis

00.5.3.1 Penciptaan, antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi

00.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif, antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas

00.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif, antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik

00.5.3.4 Penggunaan, antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip

00.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis

00.5.4 Program Arsip Vital, antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital

00.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga, antara lain: Daftar Identifkasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga

00.5.6 Penyusutan Arsip

00.5.6.1 Pemindahan Arsip, antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan

00.5.6.2 Pemusnahan Arsip, meliputi: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusanahanarsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan

00.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis, meliputi: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakandari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan

00.5.7 Alih Media Arsip, antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, BeritaAcara, Daftar Arsip yang Dialihmediakan

00.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis

00.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif

00.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif

00.5.9 Pengelolaan Arsip Statis

00.5.9.1 Akuisisi, meliputi: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yangdiserahkan

00.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan

00.5.9.3 Sejarah Lisan, antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkip

00.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis, antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis

00.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik, antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide

00.5.9.6 Preservasi Preventif, antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
00.5.9.7 Preservasi Kuratif
00.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis
00.5.9.9 Akses Arsip Statis, antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber

00.5.10 Jasa Kearsipan, antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip
00.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN
00.5.12 Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
00.5.13 Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
00.5.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
00.5.15 Pengawasan Kearsipan
00.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal
00.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal
00.5.15.3 Sanksi

**00.6 PERSANDIAN**

00.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
00.6.2 Pengamanan persandian
00.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto
00.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto
00.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan
00.6.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
00.6.3.1 Perencanaan Pengkajian
00.6.3.2 Administrasi Pengkajian
00.6.3.3 Pelaksanaan
00.6.3.4 Pelaporan
00.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian
00.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
00.6.4.2 Jaring Komunikasi
00.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
00.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi
00.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
00.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
00.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
00.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
00.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
00.6.5.7 Pelaporan

**00.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

- 00.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
  - 00.7.1.1 Musrenbang Provinsi
  - 00.7.1.2 Musrenbang Nasional
  - 00.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota
  - 00.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
  - 00.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
  - 00.7.1.6 Musrenbang Desa
- 00.7.2 Perencanaan Pembangungan Daerah
  - 00.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
  - 00.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
  - 00.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
  - 00.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
  - 00.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - 00.7.2.6 Program kerja tahunan
  - 00.7.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja
  - 00.7.2.8 Laporan Berkala
  - 00.7.2.9 Laporan Insidential
  - 00.7.2.10 Evaluasi Program
  - 00.7.2.11
- 00.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
- 00.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan
- 00.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
- 00.7.6 Aksi Strategis Daerah
  - 00.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
  - 00.7.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat
  - 00.7.6.3 Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
  - 00.7.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
  - 00.7.6.5 Penerapan perencaan aksi strategi daerah
- 00.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
  - 00.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah
  - 00.7.7.2 Pendanaan Daerah
  - 00.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
  - 00.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
  - 00.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

**00.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

- 00.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten
  - 00.8.1.1 Pembentukan
  - 00.8.1.2 Pengubahan
  - 00.8.1.3 Pembubaran
- 00.8.2 Uraian Jabatan dan Tata Kerja
  - 00.8.2.1 Analisa Jabatan
  - 00.8.2.2 Analisa Beban Kerja

00.8.3 Ketatalaksanaan
- 00.8.3.1 Proses Bisnis
- 00.8.3.2 Standar Pelayanan
- 00.8.3.3 Standar Operasional Prosedur
- 00.8.3.4 Pelayanan Publik

00.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional

00.8.5 Evaluasi Kelembagaan

00.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
- 00.8.6.1 Budaya Kerja
- 00.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
- 00.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**00.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN**

00.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

00.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi

00.9.3 Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan

00.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan

00.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

00.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 00.9.6.1 Data
- 00.9.6.2 Statistik
- 00.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian

00.9.7 Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

00.9.8 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

00.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

00.9.10 Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop

**100 PEMERINTAHAN**

**100.1 OTONOMI DAERAH**

100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)

100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga
(Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
- 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
- 100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
- 100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
- 100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
- 100.1.4.5 Assosiasi Daerah

100.1.5 Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi )
- 100.1.5.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 100.1.5.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- 100.1.5.3 Pengembangan Kapasitas Daerah

100.1.6 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

**100.2 PEMERINTAHAN UMUM**

100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama
- 100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 100.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
- 100.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
- 100.2.2.4 Fasilitasi Kecamatan
- 100.2.2.5 Fasilitasi Pelayanan Umum

100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan
- 100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah
- 100.2.3.2 Batas Antar Daerah Wilayah
- 100.2.3.3 Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
- 100.2.3.4 Pemeliharaan Batas Wilayah

100.3 **HUKUM**

100.3.1 Program Legislasi
- 100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
- 100.3.1.2 Program Legislasi

100.3.2 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan

100.3.3 Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
- 100.3.3.1 Keputusan/Ketetapan Gubernur
- 100.3.3.2 Keputusan/Ketetapan Bupati
- 100.3.3.3 Keputusan/Ketetapan Walikota
- 100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
- 100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
- 100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah Kota

100.3.4 Instruksi/ Edaran Surat
- 100.3.4.1 Instruksi/Surat Edaran Provinsi
- 100.3.4.2 Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
- 100.3.4.3 Instruksi/Surat Edaran Kota
- 100.3.4.4 Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II

100.3.5 Surat Perintah
- 100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur
- 100.3.5.2 Surat Perintah Bupati
- 100.3.5.3 Surat Perintah Walikota
- 100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II

100.3.6 Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis

100.3.7 Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
- 100.3.7.1 Dalam Negeri
- 100.3.7.2 Luar Negeri

100.3.8 Dokumentasi Hukum, antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi

100.3.9 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum

100.3.10 Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)

100.3.11 Kasus/ Sengketa Hukum
- 100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
- 100.3.11.2 Perdata Kasus/sengketa perdata
- 100.3.11.3 Tata Usaha Negara
- 100.3.11.4 Perburuhan
- 100.3.11.5 Arbitrase
- 100.3.11.6 Sengketa Adat

100.3.12 Perijinan
100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
100.3.13.1 Hak Cipta
100.3.13.2 Hak Paten
100.3.13.3 Hak Desain Industri
100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang
100.3.13.5 Hak Merk
100.3.14 Permohonan HaKI yang ditolak

**200 POLITIK**

**200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara
200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan
200.1.2.3 Bela Negara
200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan
200.1.3 Kewaspadaan Nasional
200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
200.1.4.1 Ketahanan Seni
200.1.4.2 Ketahanan Budaya Agama dan Kepercayaan
200.1.4.3 Organisasi Kemasyarakatan
200.1.4.4 Masalah Sosial Kemasyarakatan
200.1.4.5 Fasilitasi
200.1.4.6 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
200.1.4.7 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
200.1.4.8 Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
200.1.4.9 Fasilitasi Sengketa Ormas
200.1.4.10 Fasilitasi Ormas
200.1.5 Politik Dalam Negeri
200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik
200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
200.1.5.3 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
200.1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
200.1.5.5 Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
200.1.5.6 Pemerintah Daerah
200.1.5.7 Database Parpol
200.1.5.8 Pendidikan Budaya Politik
200.1.5.9 Pemilihan Umum

200.1.6 Ketahanan Ekonomi
- 200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
- 200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
- 200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat
- 200.1.6.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi

**200.2 PEMILU**

200.2.1 Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

200.2.2 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
- 200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
- 200.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- 200.2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan
- 200.2.2.4 Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- 200.2.2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

200.2.3 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
- 200.2.3.1 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
- 200.2.3.2 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
- 200.2.3.3 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
- 200.2.3.4 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual

200.2.4 Penetapan Peserta Pemilu
- 200.2.4.1 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
- 200.2.4.2 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
- 200.2.4.3 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
- 200.2.4.4 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- 200.2.4.5 Peta Daerah Pemilihan

200.2.5 Pencalonan Pemilu
- 200.2.5.1 Petunjuk teknis pencalonan
- 200.2.5.2 Surat pencalonan pendaftaran
- 200.2.5.3 Daftar bakal calon
- 200.2.5.4 Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
- 200.2.5.5 Dokumen verifikasi administrasi
- 200.2.5.6 Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap

200.2.6 Kampanye Pemilu
- 200.2.6.1 Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
- 200.2.6.2 Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
- 200.2.6.3 Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye

200.2.7 Dana Kampanye
- 200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye
- 200.2.7.2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu
- 200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye

200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara
200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
200.2.8.2 Master surat suara
200.2.8.3 Surat suara yang terpakai
200.2.8.4 Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidakdigunakan)
200.2.8.5 Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu
200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu
200.2.10.1 Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon
200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan
200.2.11 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

**300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

**300.1** SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
300.1.2.1 Tata Operasiona Polisi Pamong Praja
300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
300.1.4 Perlindungan Masyarakat
300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

**300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN**
300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
300.2.2.6 Registrasi BEACON
300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan
300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan

300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasidan Penyuluhan)
300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
300.2.8 Operasi Komunikasi
300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
300.2.8.3 Registrasi BEACON
300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan
300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi
300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi
300.2.12 Pelapooran dan Evaluasi
300.2.12.1 Laporan Harian
300.2.12.2 Laporan Bulanan
300.2.12.3 Laporoan Tahunan
300.2.12.4 Evaluasi

**400 KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.1.2 Pembangunan Sumber Daya
400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan Ketrampilan Pengembangan SumberDaya
400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan SumberDaya
400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup
400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan Inovasi
400.1.2.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan SumberDaya
400.1.2.7 Pemantauan dan Evaluasi
400.1.3 Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.2 Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam PeningkatanInfrastruktur
400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.5 Fasilitasi energi dalam Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.7 Pemantauan dan Evaluasi

400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
- 400.1.4.1 Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
- 400.1.4.2 Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
- 400.1.4.3 Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
- 400.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan usaha
- 400.1.4.5 Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
- 400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dandunia usaha
- 400.1.4.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.1.4.8 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomiperdesaan tertinggal
- 400.1.4.9 Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaantertinggal
- 400.1.4.10 Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
- 400.1.4.11 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dandesa tertinggal
- 400.1.4.12 Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
- 400.1.4.13 Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
- 400.1.4.14 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

400.1.5 Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
- 400.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga lokal
- 400.1.5.2 Penguatan organisasi masyarakat
- 400.1.5.3 Pemberdayaan masyarakat
- 400.1.5.4 Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
- 400.1.5.5 Ketenagakerjaan
- 400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembagasosial dan budaya
- 400.1.5.7 Pemantauan dan evaluasi

400.1.6 Pengembangan Daerah Khusus
- 400.1.6.1 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
- 400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
- 400.1.6.3 Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
- 400.1.6.4 Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
- 400.1.6.5 Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
- 400.1.6.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerahkhusus
- 400.1.6.7 Pemantauan dan evaluasi

**400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakyang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
- 400.2.2.1 Data gender
- 400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi

400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja,Korban Perdagangan)
- 400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
- 400.2.3.2 Data perlindungan perempuan
- 400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi
- 400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
- 400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
- 400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender
- 400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu

400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
- 400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
- 400.2.4.2 Data perlindungan anak
- 400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi
- 400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan
- 400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak

400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
- 400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak
- 400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak
- 400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak
- 400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi
- 400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
- 400.2.5.6 Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak

400.2.6 Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)

400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak

400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

**400.3 PENDIDIKAN**

400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
- 400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
- 400.3.2.2 Pelatihan Sosial
- 400.3.2.3 Peringatan Hari anak
- 400.3.2.4 Block Grant

400.3.3 Pendidikan Masyarakat
- 400.3.3.1 Penyelenggaraan Program
- 400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial
- 400.3.3.3 Pembinaan Program
- 400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan
- 400.3.3.5 Pameran
- 400.3.3.6 Rakor
- 400.3.3.7 Sosialisasi
- 400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi

400.3.4 Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik

400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
- 400.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar
- 400.3.5.2 Block Grant

400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
400.3.5.4 Lomba, penghargaan, penganugerahan
400.3.5.5 Bantuan operasional sekolah (BOS)
400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin

400.3.6 Pendidikan khusus/Layanan Khusus
400.3.6.1 Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu Pembelajaran
400.3.6.2 Block Grant
400.3.6.3 Lomba, Festival
400.3.6.4 Sosialisasi, Bimtek
400.3.6.5 Pendataan
400.3.6.6 Kelembagaan

400.3.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.7.1 Pendataan dan Pemeetaan
400.3.7.2 Uji Kompetensi Guru
400.3.7.3 Sertifikasi Guru
400.3.7.4 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
400.3.7.5 Peningkatan kesejahteraan guru
400.3.7.6 Sosialisasi, bimtek
400.3.7.7 Block Grant

400.3.8 Sekolah Menengah Atas
400.3.8.1 Kurikulum
400.3.8.2 Bahan Ajar
400.3.8.3 Pelatihan
400.3.8.4 Block grant
400.3.8.5 Bimbingan teknis/sosialisasi
400.3.8.6 Lomba , Sayembara, festival
400.3.8.7 Bantuan operasional Sekolah (BOS)
400.3.8.8 Bantuan siswa miskin
400.3.9 Pendidikan Khusus-Layanan Khusus
400.3.9.1 Bahan ajar
400.3.9.2 Petunjuk Teknis
400.3.9.3 Block grant
400.3.9.4 Sosialisasi, bimtek
400.3.9.5 Lomba, sayembara, jambore, festival
400.3.9.6 Kurikulum/bahan pembelajaran
400.3.9.7 Alat bantu pembelajaran
400.3.9.8 Pendataan
400.3.9.9 Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi

400.3.10 Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.10.1 Pendataan dan Pemetaan
400.3.10.2 Uji Kompetensi Guru
400.3.10.3 Setifikasi Guru
400.3.10.4 Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
400.3.10.5 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
400.3.10.6 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
400.3.10.7 Block grant
400.3.10.8 Bimbingan teknis/sosialisasi

400.3.11 Penilaian Pendidikan
400.3.11.1 Penilaian Akademik
400.3.11.2 Penilaian Non Akademik
400.3.11.3 Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan
400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan
400.3.13.1 Prasarana Pendidikan
400.3.13.2 Sarana Pendidikan
400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi

**400.4 KEOLAHRAGAAN**

400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan
400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi
400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi
400.4.3.1 Olahraga Massal
400.4.3.2 Olahraga Tradisional
400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
400.4.4.1 Olahraga Pendidikan
400.4.4.2 Olahraga Rekreasi
400.4.4.3 Olahraga Prestasi
400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga
400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
400.4.5.1 Olahraga Tradisional
400.4.5.2 Layanan Khusus
400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
400.4.6.2 Penghargaan Olahraga
400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
400.4.7.2 Kompetisi
400.4.7.3 IPTEK Olahraga
400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan
400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga
400.4.9.1 Industri Olahraga
400.4.9.2 Promosi Olahraga
400.4.10 Olahraga Prestasi
400.4.10.1 Daerah
400.4.10.2 Nasional
400.4.10.3 Internasional
400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga

400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan
400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga

**400.5 KEPEMUDAAN**

400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)
400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forumkepemudaan)
400.5.2.3 Pengembangan
400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda
400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan
400.5.3.2 Wawasan Lingkungan
400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum
400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda
400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa
400.5.4.2 Kapasitas IPTEK
400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK
400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
400.5.5.1 Pengkajian
400.5.5.2 Pengembangan
400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi)
400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
400.5.6.1 Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangankepedulian, pendampingan
400.5.7 Kewirausahaan
400.5.7.1 Kelembagaan
400.5.7.2 Pengaderan
400.5.7.3 Perintisan
400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan danSumberdaya
400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan
400.5.8.4 Sumberdaya
400.5.8.5 Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program danSumberdaya
400.5.9 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
400.5.9.1 Standardisasi
400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda
400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
400.5.10.1 Kemitraan
400.5.10.2 Penghargaan Pemuda

**400.6 KEBUDAYAAN**

400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

400.6.2.1 Registrasi Nasional
400.6.2.2 Pelindungan
400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan
400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi
400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman
400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan
400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
400.6.4.1 Sejarah
400.6.4.2 Pemetaan nilai
400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai
400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah
400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya
400.6.5.2 Kekayaan budaya
400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia
400.6.5.4 Diplomasi budaya

**400.7 KESEHATAN**

400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga
400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer
400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology
400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah
400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer
400.7.2.9 Pembiayaan darah
400.7.2.10 Penggunaan darah rasional
400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaringpelayanan darah
400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencildan kepulauan
400.7.2.13 Akreditasi puskesmas
400.7.2.14 Puskesmas berprestasi
400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan
400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan
400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsiumupaya kesehatan (KUK)
400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat
400.7.3.4 Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitaspelayanan kesehatan lainnya
400.7.3.5 Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
400.7.3.6 Pelayanan pasien jaminan kesehatan
400.7.3.7 Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
400.7.3.8 Badan pengawas rumah sakit

400.7.3.9 Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
400.7.3.10 Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya

400.7.4 Keperawatan dan keteknisian medik
400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar
400.7.4.2 Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
400.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
400.7.4.4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
400.7.4.5 Bina pelayanan kebidanan

400.7.5 Penunjang medik dan sarana kesehatan
400.7.5.1 Mikrobiologi dan imunologi
400.7.5.2 Patologi dan toksilogi
400.7.5.3 Radiologi
400.7.5.4 Perizinan dan sertifikasi
400.7.5.5 Sarana dan prasarana kesehatan
400.7.5.6 Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.5.7 Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan

400.7.6 Kesehatan Jiwa
400.7.6.1 Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.6.2 Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.6.3 Etikolegal dan asesmen
400.7.6.4 Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
400.7.6.5 Etikolegal dan asesmen
400.7.6.6 Kesehatan jiwa kelompok beresiko

400.7.7 Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
400.7.7.1 Surveilans dan respon kejadian luar biasa
400.7.7.2 Imunisasi
400.7.7.3 Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
400.7.7.4 Kesehatan matra

400.7.8 Pengendalian penyakit menular langsung
400.7.8.1 Pengendalian tuberkolosis
400.7.8.2 Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
400.7.8.3 Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
400.7.8.4 Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
400.7.8.5 Pengendalian kusta dan frambusia

400.7.9 Pengendalian penyakit bersumber binatang
400.7.9.1 Pengendalian malaria
400.7.9.2 Pengendalian arbovirosis
400.7.9.3 Pengendalian zoonosis
400.7.9.4 Pengendalian filariasis dan kecacingan

400.7.10 Pengendalian penyakit tidak menular

400.7.10.1 Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
400.7.10.2 Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakitmetabolik
400.7.10.3 Penyakit kanker
400.7.10.4 Penyakit kronis dan generatif
400.7.10.5 Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan

400.7.11 Penyehatan lingkungan
400.7.11.1 Penyehatan air dan sanitasi dasar
400.7.11.2 Pemukiman dan tempat umum
400.7.11.3 Kawasan dan sanitasi darurat
400.7.11.4 Higien sanitasi pangan
400.7.11.5 Pengamanan limbah, udara, radiasi

400.7.12 Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan

400.7.13 Gizi
400.7.13.1 Gizi makro
400.7.13.2 Gizi mikro
400.7.13.3 Gizi klinik dan diatetik
400.7.13.4 Konsumsi makanan dan jasa makanan
400.7.13.5 Kewaspadaan gizi

400.7.14 Kesehatan ibu
400.7.14.1 Kesehatan ibu hamil
400.7.14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas
400.7.14.3 Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
400.7.14.4 Keluarga berencana
400.7.14.5 Perlindungan kesehatan reproduksi

400.7.15 Kesehatan anak
400.7.15.1 Kelangsungan hidup bayi
400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
400.7.15.3 Kewaspadaan penanganan balita beresiko
400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak

400.7.16 Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
400.7.16.1 Kesehatan tradisional keterampilan
400.7.16.2 Kesehatan tradisional ramuan
400.7.16.3 Kesehatan alternatif dan komplementer
400.7.16.4 Penapisan dan kemitraan

400.7.17 Kesehatan kerja dan Olah raga
400.7.17.1 Pelayanan kesehatan kerja
400.7.17.2 Kapasitas kerja
400.7.17.3 Lingkungan kerja
400.7.17.4 Kemitraan kesehatan kerja
400.7.17.5 Kesehatan perkotaan
400.7.17.6 Kesehatan olahraga

400.7.18 Obat Publk dan perbekalan kesehatan
- 400.7.18.1 Harga obat publik
- 400.7.18.2 Pengadaan obat
- 400.7.18.3 Perbekalan kesehatan

400.7.19 Produksi dan distribusi alat kesehatan
- 400.7.19.1 Alat kesehatan
- 400.7.19.2 Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
- 400.7.19.3 Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga

400.7.20 Kefarmasian
- 400.7.20.1 Pelayanan kefarmasian
- 400.7.20.2 Farmasi klinis
- 400.7.20.3 Farmasi Komunitas
- 400.7.20.4 Penggunaan obat rasional

400.7.21 Produksi dan distribusi kefarmasian
- 400.7.21.1 Obat tradisional
- 400.7.21.2 Kosmetik dan makanan
- 400.7.21.3 Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
- 400.7.21.4 Kemandirian obat dan bahan baku obat

400.7.22 Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
- 400.7.22.1 Surat keterangan
- 400.7.22.2 Sertifikasi dan perijinan

400.7.23 Penanggulangan Krisis Kesehatan
- 400.7.23.1 Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
- 400.7.23.2 Tanggap darurat dan pemulihan
- 400.7.23.3 Pemantauan dan informasi
- 400.7.23.4 Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
- 400.7.23.5 Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana

400.7.24 Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
- 400.7.24.1 Tersedianya data NHA setiap tahun
- 400.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN

400.7.25 Intelegensia Kesehatan
- 400.7.25.1 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia
- 400.7.25.2 Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan

400.7.26 Kesehatan Haji
- 400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
- 400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji

400.7.27 Promosi Kesehatan
- 400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan
- 400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
- 400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan
- 400.7.27.4 Hari kesehatan

400.7.28 Data dan Informasi
400.7.28.1 Statistik kesehatan
400.7.28.2 Analisis dan diseminasi informasi
400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
400.7.29 Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
400.7.29.1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
400.7.29.2 Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produkkomplimen
400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
400.7.29.4 Obat Asli Indonesia
400.7.30 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
400.7.30.1 Penilaian keamanan pangan
400.7.30.2 Standardisasi produk pangan
400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
400.7.30.4 Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan
400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya
400.7.31 Rekam Medis

**400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN**

400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.8.2 Fasilitasi
400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota
400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayan
400.8.2.4 Kasus Keagamaan
400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan
400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
400.8.3.1 Kelembagaan dan Kepercayaan
400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan
400.8.3.4 Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional
400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial

**400.9 SOIAL**

400.9.2 Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.9.3 Kesejahteraan Sosial Anak
400.9.3.1 Kesejahteraan sosial anak balita
400.9.3.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar
400.9.3.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
400.9.3.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
400.9.3.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungankhusus

400.9.4 Rehabilitasi Sosial
- 400.9.4.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekaspenderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
- 400.9.4.2 Kelembagaan dan advokasi social
- 400.9.4.3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial

400.9.5 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
- 400.9.5.1 Gelandangan, pengemis dan pemulung
- 400.9.5.2 Tuna susila dan korban traffking perempuan
- 400.9.5.3 Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan,reintegrasi
- 400.9.5.4 Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompokminoritas

400.9.6 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

400.9.7 Pelayanan sosial lanjut usia
- 400.9.7.1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti
- 400.9.7.2 Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga,kerjasama lembaga
- 400.9.7.3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan

400.9.8 Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial

400.9.9 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

400.9.10 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
- 400.9.10.1 Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial,penguatan Sumber Daya
- 400.9.10.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
- 400.9.10.3 Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
- 400.9.10.4 Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama nonpemerintah

400.9.11 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- 400.9.11.1 Kesiapsiagaan dan mitigasi
- 400.9.11.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
- 400.9.11.3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial
- 400.9.11.4 Kerjasama

400.9.12 Jaminan Sosial
- 400.9.12.1 Seleksi dan vrifikasi
- 400.9.12.2 Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan,pengelolaan premi
- 400.9.12.3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
- 400.9.12.4 Kerjasama

400.9.13 Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
- 400.9.13.1 Ketahanan keluarga
- 400.9.13.2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
- 400.9.13.3 Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasisosial
- 400.9.13.4 Kemitraan dunia usaha
- 400.9.13.5 Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangankapasitas

400.9.14 Pemberdayaan komunitas adat terpencil
- 400.9.14.1 Persiapan pemberdayaan
- 400.9.14.2 Pemberdayaan sumber daya manusia

400.9.14.3 Penggalian dan pengembangan potensi
400.9.14.4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
400.9.14.5 Kerjasama kelembagaan
400.9.15 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
400.9.15.1 Identifikasi dan analisis
400.9.15.2 Pengembangan kapasitas
400.9.15.3 Penataan sosial lingkungan kumuh
400.9.15.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
400.9.15.5 Bantuan Langsung
400.9.15.6 Kerjasama Kelembagaan
400.9.16 Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
400.9.16.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
400.9.16.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
400.9.16.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial
400.9.16.4 Pengelolaan taman makam pahlawan

**400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa
400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa
400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan
400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat
400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
400.10.4.1 Budaya Nusantara
400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan
400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial
400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan

400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat
400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran
400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan

400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

**400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN**

400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.11.2 Pertamanan
400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan
400.11.2.2 Taman Kota
400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota
400.11.3 Pemakaman
400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman
400.11.3.2 Pemakaman
400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman
400.11.4 Jalur Hijau
400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
400.11.5 Peran Serta Masyarakat
400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
400.11.7 Pengelolaan Data
400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

**400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
400.12.2 Pendaftaran Penduduk
400.12.2.1 Identitas Penduduk
400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.3 Pencatatan Sipil
400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi

400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi

400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
400.12.5.2 Kualitas Penduduk
400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
400.12.6 Penyerasian Kependudukan
400.12.6.1 Indikator Kependudukan
400.12.6.2 Proyeksi Penduduk
400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah

**400.13 KELUARGA BERENCANA**

400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
400.13.3.1 Penyiapan fasilitas
400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan
400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk
400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk
400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk
400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter
400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter
400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi
400.13.6.2 Pemanfaatan parameter
400.13.7 Pengembangan Sistem
400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.8 Pengembangan Materi
400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan
400.13.10 Analisis Sosial
400.13.11 Analisis Ekonomi
400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah

400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana

400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah

400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah

400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana

400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta

400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta

400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta

400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta

400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta

400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan

400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan

400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan

400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria

400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria

400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria

400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak

400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS

400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas

400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak

400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak

400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak

400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak .

400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak

400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak

400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja

400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan

400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat

400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja

400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja

400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja

400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia

400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan

400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga

400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga

400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga

400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga

400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga

400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga

400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.38.2 Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

400.13.41 Advokasi dan pencitraan

400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi

400.13.42.1 Promosi

400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi

400.13.42.3 Produk media komunikasi

400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi

400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
- 400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
- 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintahkabupaten dan kota

400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
- 400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
- 400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah

400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
- 400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan
- 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan

400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan
- 400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
- 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan

400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan
- 400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
- 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan

400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
- 400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
- 400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan

400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data

400.13.51 Analisis dan evaluasi
- 400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
- 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera

400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data
- 400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi
- 400.13.52.2 Pengelolaan bank data

400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi
- 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
- 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi

400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
- 400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan
- 400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

**400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT**

400.14.1 Keprotokolan
- 400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
- 400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan

400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah
400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat
400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media
400.14.4 Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
400.14.4.1 Kliping koran
400.14.4.2 Brosur/Leaflet/poster/plakat
400.14.4.3 Pengumuman/pemberitaan
400.14.4.4 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
400.14.4.5 Hubungan antar lembaga pemerintah
400.14.4.6 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
400.14.4.7 Hubungan dengan perusahaan
400.14.4.8 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)
400.14.4.9 Forum Kehumasan
400.14.4.10 Hubungan dengan Media Massa
400.14.5 Dengar pendapat/hearing DPRD
400.14.6 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
400.14.7 Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal
400.14.8 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
400.14.9 Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan
400.14.10 Penghargaan/tanda kenang-kenangan
400.14.11 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

**500 PEREKONOMIAN**

**500.1 KETAHANAN PANGAN**

500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
500.1.2.2 Akses Pangan
500.1.2.3 Kerawanan Pangan
500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
500.1.3.1 Distribusi Pangan
500.1.3.2 Harga Pangan
500.1.3.3 Cadangan Pangan
500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
500.1.4.1 Konsumsi Pangan
500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
500.1.5.2 Penghargaan Ketahan Pangan
500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
500.1.7 Bimbingan Teknis
500.1.8 Evaluasi

## 500.2 PERDAGANGAN

500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri

- 500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
- 500.2.2.2 Bisa Usaha Jasa Perdangan
- 500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
- 500.2.2.4 Informasi Perusahaan
- 500.2.2.5 Pelaku Pasar
- 500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil
- 500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
- 500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal
- 500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri
- 500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi
- 500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi
- 500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
- 500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
- 500.2.2.14 Informasi Pasar
- 500.2.2.15 Informasi Hasil Industri
- 500.2.2.16 Barang Strategis
- 500.2.2.17 Bahan Pokok Agro

500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

- 500.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar
- 500.2.3.2 Kerjasama Standarisasi
- 500.2.3.3 Perumusan dan penerapan standar
- 500.2.3.4 Tata usaha
- 500.2.3.5 Kerjasama, informasi, dan publikasi
- 500.2.3.6 Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
- 500.2.3.7 Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
- 500.2.3.8 Fasilitas kelembagaan
- 500.2.3.9 Produk pertambangan dan aneka industri
- 500.2.3.10 Produk pertanian, kimia dan kehutanan
- 500.2.3.11 Jasa
- 500.2.3.12 Kerjasama
- 500.2.3.13 Sarana dan Kerjasama
- 500.2.3.14 Kelembagaan dan dan penilaian
- 500.2.3.15 UTTP dan Standar Ukuran
- 500.2.3.16 Pengawasan
- 500.2.3.17 Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
- 500.2.3.18 Balai Pengujian UTTP

500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi

- 500.2.4.1 Pengkajian pasar
- 500.2.4.2 Pengawasan Transaksi
- 500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit
- 500.2.4.4 Pengkajian pasar
- 500.2.4.5 Pengembangan Pasar
- 500.2.4.6 Sistem informasi
- 500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang

500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang
500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang
500.2.5 Bimbingan Teknis
500.2.6 Evaluasi

## 500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM
500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM
500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas
500.3.3 Produksi
500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan
500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan
500.3.3.4 Industri Kerajinan dan Pertambangan
500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
500.3.4 Pembiayaan
500.3.4.1 Program Pendanaan
500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
500.3.4.3 Urusan Permodalan
500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan
500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha
500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri
500.3.5.2 Ekspor dan Impor
500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran
500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha
500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis
500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
500.3.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia
500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan
500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat
500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
500.3.6.5 Advokasi
500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu
500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha
500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK
500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis
500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK
500.3.8.1 Penelitian Koperasi

500.3.8.2 Penelitian UKM
500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya
500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK
500.3.9 Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
500.3.10 Pedagang Kaki Lima (PKL)
500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan
500.3.10.2 Sarana dan Prasarana
500.3.11 Monitoring dan Evaluasi

**500.4 KEHUTANAN**

500.4.1 Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.4.2 Penyuluhan
500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan
500.4.2.2 Materi Penyuluhan
500.4.2.3 Program Penyuluhan
500.4.2.4 Sarana Penyuluhan
500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan
500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan
500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat
500.4.2.8 Deseminasi
500.4.2.9 Evaluasi, dan Laporan
500.4.3 Planologi Kehutanan
500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan
500.4.3.2 Penataan Ruang Kawasan Hutan
500.4.3.3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
500.4.3.4 Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
500.4.3.5 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
500.4.3.6 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
500.4.3.7 Inventarisasi Sumber Daya Hutan
500.4.3.8 Pemantauan Sumber Daya Hutan
500.4.3.9 Pemetaan Sumber Daya Hutan
500.4.3.10 Jaringan Data Spasial
500.4.3.11 Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.12 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan
500.4.3.13 Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.14 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
500.4.3.15 Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
500.4.3.16 Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
500.4.4 Bina Usaha Kehutanan
500.4.4.1 Data areal HPH /HTI/IUPHHK
500.4.4.2 SK HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.3 Kerjasama
500.4.4.4 Pembatalan/Penolakan
500.4.4.5 Perpanjangan
500.4.4.6 Modal dan Peralatan
500.4.4.7 Investasi Industri
500.4.4.8 Peralatan
500.4.4.9 Tenaga Kerja
500.4.4.10 Pemegang Saham
500.4.4.11 Neraca Perusahaan

500.4.4.12 Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
500.4.4.13 Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
500.4.4.14 Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
500.4.4.15 Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
500.4.4.16 Target Produksi RKT dan Beban Kerja
500.4.4.17 Produksi Kayu
500.4.4.18 Produksi non kayu
500.4.4.19 Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.20 Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.21 Industri Non Kayu
500.4.4.22 Hutan Tanaman Industri Pulp
500.4.4.23 Hutan Tanaman Industri Pertukangan
500.4.4.24 Pelanggaran dan Sanksi
500.4.4.25 Pemblokiran
500.4.4.26 Denda
500.4.4.27 Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.28 Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.29 Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.30 Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
500.4.4.31 Pengembangan Investasi Usaha
500.4.4.32 Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.33 Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana KerjaUsaha Produksi Hasil
500.4.4.34 Produksi Hutan Alam
500.4.4.35 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.36 Pengembangan Hutan Tanaman Industri
500.4.4.37 Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
500.4.4.38 Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
500.4.4.39 Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan
500.4.4.40 Pembiayaan Hutan Tanaman
500.4.4.41 Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
500.4.4.42 Peredaran Hasil Hutan
500.4.4.43 Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
500.4.4.44 Penertiban Peredaran Hasil Hutan
500.4.4.45 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
500.4.4.46 Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
500.4.4.47 Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
500.4.4.48 Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.49 Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur

500.4.5 Standardisasi dan Lingkungan
500.4.5.1 Standardisasi
500.4.5.2 Sarana Pengujian Hasil Hutan
500.4.5.3 Pengembangan
500.4.5.4 Pemasaran Hasil Hutan
500.4.5.5 Pengendalian Lingkungan
500.4.5.6 Angkutan Hasil Hutan
500.4.5.7 Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan

500.4.5.8 Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
500.4.5.9 Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
500.4.5.10 Pass Angkutan Hasil Hutan
500.4.5.11 Sertifikat Ekspor Hasil Hutan

500.4.6 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
500.4.6.1 Flora dan Fauna yang Dilindungi
500.4.6.2 Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
500.4.6.3 Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
500.4.6.4 Konvensi Keanekaragaman Hayati
500.4.6.5 Kawasan Konservasi
500.4.6.6 Pengamanan Hutan
500.4.6.7 Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
500.4.6.8 Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
500.4.6.9 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.4.6.10 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
500.4.6.11 Bina Cinta Alam
500.4.6.12 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
500.4.6.13 Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA

500.4.7 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
500.4.7.1 Pengelolaan Benih
500.4.7.2 Kebun Benih
500.4.7.3 Tegakan Benih
500.4.7.4 Pengadaan Benih
500.4.7.5 Pengujian dan Penyimpanan Benih
500.4.7.6 Lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.7 Pembibitan
500.4.7.8 Lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.9 Pengembangan Usaha Perbenihan
500.4.7.10 Pengendalian Peredaran Benih
500.4.7.11 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
500.4.7.12 Tanaman Reboisasi
500.4.7.13 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
500.4.7.14 Perhutanan Sosial
500.4.7.15 Pengendalian Perladangan

500.4.8 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
500.4.8.1 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
500.4.8.2 Monitoring dan Evaluasi Penelitian
500.4.8.3 Diseminasi
500.4.8.4 Gelar Teknologi
500.4.8.5 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

## 500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN

500.5.1 Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.5.2 Perikanan Tangkap
500.5.2.1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap
500.5.2.2 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan

500.5.2.3 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
500.5.2.4 Pendaftaran Kapal Perikanan
500.5.2.5 Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
500.5.2.6 Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
500.5.2.7 Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.2.8 Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
500.5.2.9 Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
500.5.2.10 Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
500.5.2.11 Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan
500.5.2.12 Kelembgaan Usaha Penangkapan
500.5.2.13 Investasi dan Permodalan Usaha
500.5.2.14 Kenelayanan
500.5.2.15 Pembinaan Pengelolaan Usaha
500.5.2.16 Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan

500.5.3 Perikanan Budidaya
500.5.3.1 Potensi Lahan dan Air
500.5.3.2 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
500.5.3.3 Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
500.5.3.4 Perbenihan Skala Kecil
500.5.3.5 Informasi dan Distribusi Pembenihan
500.5.3.6 Budidaya Air Tawar
500.5.3.7 Budidaya Ikan Hias
500.5.3.8 Sertifikasi Budidaya Perikanan
500.5.3.9 Data dan Statistik Perikanan Budidaya
500.5.3.10 Hama dan Penyakit Ikan
500.5.3.11 Perlindungan Lingkungan Budidaya
500.5.3.12 Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
500.5.3.13 Kewirausahaan Budidaya
500.5.3.14 Pelayanan Usaha Budidaya
500.5.3.15 Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
500.5.3.16 Promosi Usaha dan Budaya

500.5.4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
500.5.4.1 Standarisasi Pengolahan Hasil
500.5.4.2 Pengembangan Produk
500.5.4.3 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
500.5.4.4 Industri Pengolahan
500.5.4.5 Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
500.5.4.6 Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
500.5.4.7 Promosi dan Jaringan Ikan Hias
500.5.4.8 Pengembangan Industri
500.5.4.9 Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
500.5.4.10 Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.11 Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
500.5.4.12 Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.13 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.14 Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri

500.5.4.15 Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
500.5.4.16 Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
500.5.4.17 Pengembangan Ekspor
500.5.4.18 Pengembangan Impor
500.5.4.19 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
500.5.4.20 Pelayanan Usaha
500.5.4.21 Kemitraan Usaha
500.5.4.22 Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
500.5.4.23 Investasi dan Permodalan
500.5.4.24 Informasi dan Promosi

**500.6 PERTANIAN**

500.6.1 Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.6.2 Perlindungan hortikultura
500.6.2.1 Perlindungan Tanaman Buah
500.6.2.2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
500.6.2.3 Perlindungan Tanaman Florikultura
500.6.2.4 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
500.6.3 Perbenihan Hortikultura
500.6.3.1 Penilaian Varietas
500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih
500.6.3.3 Budidaya dan Pascapanen Florikultura
500.6.4 Perluasan dan Pengelolaan Lahan
500.6.4.1 Basis Data Lahan
500.6.4.2 Pengendalian Lahan
500.6.4.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
500.6.4.4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
500.6.4.5 Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
500.6.5 Pengelolaan Air Irigasi
500.6.5.1 Pengembangan Sumber Air
500.6.5.2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
500.6.5.3 Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
500.6.5.4 Kelembagaan
500.6.6 Pembiayaan Pertanian
500.6.6.1 Pembiayaan Program
500.6.6.2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
500.6.6.3 Pembiayaan agribisnis
500.6.6.4 Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
500.6.7 Pupuk Pestisida
500.6.7.1 Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
500.6.7.2 Pupuk Anorganik
500.6.7.3 Pestisida
500.6.7.4 Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8 Alat dan Mesin Pertanian
500.6.8.1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.8.2 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
500.6.8.3 Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian

500.6.9 Perbenihan Tanaman Pangan
- 500.6.9.1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
- 500.6.9.2 Produksi Benih Serealia
- 500.6.9.3 Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
- 500.6.9.4 Kelembagaan Benih

500.6.10 Budidaya Serealia
- 500.6.10.1 Padi Irigasi dan Rawa
- 500.6.10.2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
- 500.6.10.3 Jagung
- 500.6.10.4 Serealia Lain

500.6.11 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
- 500.6.11.1 Kedelai
- 500.6.11.2 Ubi Kayu
- 500.6.11.3 Aneka Kacang
- 500.6.11.4 Aneka Umbi

500.6.12 Tanaman Pangan
- 500.6.12.1 Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
- 500.6.12.2 Dampak Perubahan Iklim
- 500.6.12.3 Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
- 500.6.12.4 Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu

500.6.13 Pascapanen Tanaman Pangan
- 500.6.13.1 adi
- 500.6.13.2 Jagung dan Serealia alin
- 500.6.13.3 Kedelai dan Aneka Kacang
- 500.6.13.4 Aneka Umbi

500.6.14 Pengolahan Hasil Pertanian
- 500.6.14.1 Tanaman Pangan
- 500.6.14.2 Holtikurtura
- 500.6.14.3 Perkebunan
- 500.6.14.4 Peternakan

500.6.15 Mutu dan Standariasi
- 500.6.15.1 Standardisasi
- 500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
- 500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan
- 500.6.15.4 Kerjasama dan Harmonisasi

500.6.16 Pengembangan Usaha dan Investasi
- 500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan
- 500.6.16.2 Investasi
- 500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri
- 500.6.16.4 Promosi Luar Negeri

500.6.17 Pemasaran Domestik
- 500.6.17.1 Informasi Pasar
- 500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
- 500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar
- 500.6.17.4 Jaringan Pemasaran

500.6.18 Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat

500.6.19 Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
- 500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan
- 500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi

500.6.20 Diseminasi

500.6.21 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
- 500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
- 500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya

500.6.22 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
500.6.23 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.6.24 Data Penelitian dan Pengembangan
500.6.25 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
500.6.26 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
- 500.6.26.1 Hak Cipta
- 500.6.26.2 Hak Paten Sederhana
- 500.6.26.3 Hak Paten Biasa
- 500.6.26.4 Hak Merek
- 500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman
- 500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
- 500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak

500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian
- 500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
- 500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
- 500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)

500.6.28 Pelayanan Hukum
- 500.6.28.1 Sertifikasi
- 500.6.28.2 Pertimbangan Hukum

500.6.29 Karantina Pertanian
- 500.6.29.1 Karantina Tumbuhan
- 500.6.29.2 Karantina Hewan

500.6.30 Bimbingan Teknis
500.6.31 Evaluasi

## 500.7 PETERNAKAN

500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 500.7.2.1 Perbibitan Ternak, antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran
- 500.7.2.2 Pakan Ternak
- 500.7.2.3 Budidaya Ternak
- 500.7.2.4 Kesehatan Hewan, antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan

500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran

500.7.3 Bimbingn Teknis

500.7.4 Evaluasi

## 500.8 PERKEBUNAN

500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.8.2 Tanaman Semusim

500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim

500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim

500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim

500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim

500.8.3 Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.4 Tanaman Tahunan

500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan

500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan

500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan

500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan

500.8.5 Perlindungan Perkebunan

500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan

500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan

500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha

500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar

500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan

500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik

500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan
500.8.8 Evaluasi Perkebunan

**500.9 PERINDUSTRIAN**

500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama
500.9.2.1 Industri Manufaktur
500.9.2.2 Industri Agro
500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah
500.9.3 Promosi Industri
500.9.3.1 Industri Manufaktur
500.9.3.2 Promosi Industri Agro
500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah
500.9.4 Standarisasi dan Teknologi
500.9.4.1 Industri Manufaktur
500.9.4.2 Industri Agro
500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah
500.9.5 Hak atas Kekayaan Intelektual
500.9.5.1 Industri Manufaktur
500.9.5.2 Industri Agro
500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah
500.9.6 Industri Hijau
500.9.6.1 Industri Manufaktur
500.9.6.2 Industri Agro
500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah
500.9.7 Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
500.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
500.9.9 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
500.9.10 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
500.9.12 Standarisasi
500.9.12.1 Standar
500.9.12.2 Penyiapan Penerapan
500.9.12.3 Infrastruktur Standar
500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
500.9.13.1 Kebijakan Industri
500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif
500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial
500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
500.9.14.1 Industri Hijau
500.9.14.2 Lingkungan Hidup
500.9.14.3 Energi
500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri

**500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.10.2 Rekomendasi Kegeologian

500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan

500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

500.10.2.3 Pertambangan

500.10.2.4 Panas Bumi

500.10.2.5 Geosains

500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)

500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan

500.10.3 Penelitian Kegeologian

500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian

500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian

500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian

500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi

500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian

500.10.3.6 Sumber Daya Geologi

500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

500.10.3.9 Survei Geologi

500.10.3.10 Inventarisasi dan evaluasi kegeologian

500.10.3.11 Sumber Daya Geologi

500.10.3.12 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

500.10.3.13 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

500.10.3.14 Survei Geologi

500.10.3.15 Konservasi

500.10.4 Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi

500.10.4.1 Peta potensi dan sebaran

500.10.4.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

500.10.4.3 Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara

500.10.4.4 Survei Geologi

500.10.5 Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

500.10.5.1 Rencana Induk Jaringan Gas Bumi

500.10.5.2 Rencana dan Realisasi Investasi

500.10.5.3 Penetapan Harga Minyak Mentah

500.10.5.4 Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) Minyak dan Gas Bumi

500.10.5.5 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP

500.10.5.6 Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

500.10.5.7 Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri

500.10.5.8 Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)

500.10.6 Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

500.10.6.1 Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional

500.10.6.2 Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyakdan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan

500.10.6.3 Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/ Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi

500.10.6.4 Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)

500.10.6.5 Perpanjangan Kontrak KKS

500.10.6.6 Penetapan Alokasi dan Harga Gas

500.10.6.7 Partisipasi Interest

500.10.6.8 Tumpang Tindih Lahan

500.10.7 Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

500.10.7.1 Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan

500.10.7.2 Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran

500.10.7.3 Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkandengan Keputusan Menteri

500.10.8 Teknik dan Lingkungan

500.10.8.1 Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar NasionalIndonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

500.10.8.2 Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), antara lain:
Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT

500.10.8.3 **Buku** Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)

500.10.8.4 **Register** dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las

500.10.8.5 **Keselamatan** Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi

500.10.8.6 Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, antara lain:
Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi

500.10.8.7 Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan

500.10.8.8 Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi,Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi

500.10.8.9 Penghargaan Keselamatan Kerja, antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi

500.10.8.10 Usaha penunjang

500.10.9 Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

500.10.9.1 Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur

500.10.9.2 Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan GasBumi

500.10.9.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan GasBumi

500.10.9.4 Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan InfrastukturMinyak dan Gas Bumi

500.10.10 Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

500.10.11.1 Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi

500.10.11.2 Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga

500.10.11.3 Penyiapan Program Pemanfaatan Energi

500.10.11.4 Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT

500.10.11.5 Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT

500.10.11.6 Penyusunan Neraca Energi

500.10.11.7 Road Map di Bidang EBT

| | | |
|---|---|---|
| 500.10.12 | Panas Bumi | |
| | 500.10.12.1 | Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) |
| | 500.10.12.2 | Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) |
| | 500.10.12.3 | Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan |
| | 500.10.12.4 | Rekomendasi Bahan Peledak |
| | 500.10.12.5 | Perizinan penggunaan gudang bahan peledak |
| | 500.10.12.6 | Izin Tangki Bahan Bakar Cair |
| | 500.10.12.7 | Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las |
| | 500.10.12.8 | Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP) |
| | 500.10.12.9 | Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB) |
| | 500.10.12.10 | Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL) |
| | 500.10.12.11 | Penetapan kapasitas usaha panas bumi |
| | 500.10.12.12 | Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) |
| | 500.10.12.13 | Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi |
| | 500.10.12.14 | Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi |
| | 500.10.12.15 | Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi |
| | 500.10.12.16 | Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi |
| | 500.10.12.17 | Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi |
| 500.10.13 | Bioenergi | |
| | 500.10.13.1 | Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) |
| | 500.10.13.2 | Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN) |
| | 500.10.13.3 | Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor |
| | 500.10.13.4 | Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN) |
| | 500.10.13.5 | Evaluasi/Revisi HIP BBN |
| | 500.10.13.6 | Database Pengusahaan Bioenergi |
| | 500.10.13.7 | Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk |
| | 500.10.13.8 | Pembangkit Listrik Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati |
| | 500.10.13.9 | Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga |

500.10.14 Aneka Energi

500.10.14.1 Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
500.10.14.2 Penetapan Kapasitas Usaha
500.10.14.3 Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
500.10.14.4 Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
500.10.14.5 Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)

500.10.15 Konservasi Energi

500.10.15.1 Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
500.10.15.2 Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
500.10.15.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
500.10.15.4 Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
500.10.15.5 Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
500.10.15.6 Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
500.10.15.7 Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
500.10.15.8 Profil investasi efisiensi energi
500.10.15.9 Invesment Grade Audit (IGA)
500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE

500.10.16 Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE

500.10.16.1 Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.16.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.16.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
500.10.16.4 Evaluasi Program Kerja

500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik

500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga listrik, antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik
500.10.17.2 Pengembangan listrik pedesaan, antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu
500.10.17.3 Data dan Informasi Ketenagalistrikan

500.10.18 Bina Usaha Ketenagalistikan

500.10.18.1 Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, antara lain: Pelayanan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data Laporan Berkala Pemegang Izin

500.10.18.2 Harga dan Subsidi Listrik

500.10.18.3 Hubungan komersial tenaga listrik

500.10.18.4 Perlindungan konsumen listrik, antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)

500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

500.10.19.2 Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik

500.10.19.3 Usaha penunjang ketenagalistrikan, antara lain: DokumenIzin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)

500.10.19.4 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)

500.10.20 Sertifikasi

500.10.20.1 Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik

500.10.20.2 Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)

500.10.20.3 Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik

500.10.20.4 Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik

500.10.20.5 Registrasi Sertifikasi

500.10.21 Akreditasi Ketenagalistrikan

500.10.22 Standarisasi Kompetensi

500.10.23 Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan

500.10.24 Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan

500.10.25 Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan

500.10.26 Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
500.10.27 Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
500.10.28 Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
500.10.29 Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
500.10.30 Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
500.10.30.1 Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
500.10.30.2Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
500.10.30.3 Laporan hasil pengawasan penunjukan
500.10.31 Bina Program Mineral dan Batubara
500.10.31.1Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
500.10.31.3 Rencana Induk Mineral dan BatubaraPengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineraldan Batubara
500.10.31.4 Data dan Informasai Mineral dan Batubara
500.10.31.5 Pelaporan Program Mineral dan Batubara
500.10.31.6 Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
500.10.31.7 Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
500.10.31.8 Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
500.10.31.9 Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
500.20.31 Pembinaan Pengusahaan Mineral
500.20.32 Ketenagakerjaan
500.10.34 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
500.10.35 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
500.10.36 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
500.10.36.1Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
500.10.36.2Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
500.10.36.3 Perizinan usaha pertambangan mineral
500.10.36.4 Kontrak Karya (KK)
500.10.36.5 Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
500.10.36.6 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
500.10.36.7 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, padaperusahaan mineral
500.10.36.8 Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
500.10.36.9 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha
500.10.36.10 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
500.10.36.11 Pelaporan usaha pertambangan mineral
500.10.36.12 Penghargaan usaha pertambangan mineral
500.10.36.13 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral

500.10.37 Pembinaan Pengusahaan Batubara

500.10.37.1 Ketenagakerjaan

500.10.37.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang

500.10.37.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara

500.10.37.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara

500.10.37.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara

500.10.37.6 Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara

500.10.37.7 Perizinan Usaha Pertambangan Batubara

500.10.37.8 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

500.10.37.9 Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara

500.10.37.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)

500.10.37.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

500.10.37.12 Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

500.10.37.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara

500.10.37.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir

500.10.37.15 Pelaporan usaha pertambangan batubara

500.10.37.16 Penghargaan usaha pertambangan batubara

500.10.37.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara

500.10.38 Penerimaan Negara

500.10.38.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

500.10.38.2 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

500.10.38.3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP

500.10.39 Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

500.10.39.1 Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)

500.10.39.2 Pengawasan Standardisasi

500.10.39.3 Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang

500.10.39.4 Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

500.10.39.5 Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi

500.10.39.6 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

500.10.39.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan UPL

500.10.39.8 Rekomendasi bahan kimia

500.10.39.9 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang

500.10.39.10 Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi, antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi

500.10.39.11 Pemberian Penghargaan, antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan

500.10.39.12 Pengawasan lingkungan pertambangan

500.10.39.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara

500.10.39.14 Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara

500.10.39.15 Rekomendasi Teknis, antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis

500.10.39.16 Persetujuan Teknis, antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis

500.10.39.17 Pengawasan Teknis

500.10.39.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara

500.10.39.19 Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubaraantara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan

500.10.40 Program Penelitian dan Pengembangan

500.10.40.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan

500.10.40.2 Pengembangan dan inovasi 500.10.40.3 Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/ pengkajian/pengembangan/ inovasi

500.10.40.4Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan daninovasi

500.10.40.5 Diseminasi hasil penelitian,pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

500.10.40.6 Pembinaan penelitian/Pengembangan,pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi

500.10.40.7 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

500.10.40.8 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

500.10.40.9 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

500.10.40.10 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)

500.10.40.11 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

500.10.40.12 Layanan jasa penelitian, pengembangan,penerapan IPTEK

500.10.40.13 Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral

500.10.41 Sarana Litbang

500.10.41.1 Administrasi penggunaan peralatan

500.10.41.2 Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi

500.10.42 Afiliasi
500.10.42.1 Proyek Percontohan
500.10.42.2 Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
500.10.42.3 Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
500.10.42.4 Penyajian Informasi
500.10.43 Penelitian dan Pengembangan Kegeologian

500.10.44 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
500.10.45 Teknologi Eksplorasi
500.10.45.1 Teknologi Eksploitasi
500.10.45.2 Laboratorium
500.10.45.3 Study
500.10.45.4 Teknologi Proses 500.10.45.5 Teknologi Aplikasi Produk
500.10.45.6 Teknologi Gas
500.10.46 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara
500.10.47 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
500.10.47.1 Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
500.10.47.2 Teknologi Pemanfaatan Batubara
500.10.48 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru
Terbarukan
500.10.48.1 Energi baru terbarukan
500.10.48.2 Teknologi Ketenagalistrikan
500.10.48.3 Lingkungan dan Konservasi Energi
500.10.48.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

**500.11 PERHUBUNGAN**

500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipepenunjang
500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer
500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal
500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder

500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan
500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutanjalan
500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan

500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor
- 500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
- 500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
- 500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
- 500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor

500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor
- 500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
- 500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
- 500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
- 500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor

500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- 500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
- 500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional

500.11.7 Perlengkapan Jalan
- 500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan
- 500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
- 500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
- 500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
- 500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional

500.11.8 Angkutan Penumpang
- 500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
- 500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
- 500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar provinsi
- 500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
- 500.11.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
- 500.11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum
- 500.11.8.7 Angkutan perintis
- 500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum

500.11.9 Angkutan Barang
- 500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
- 500.11.9.2 Tarif angkutan barang
- 500.11.9.3 Izin operasi angkutan barang tertentu
- 500.11.9.4 Pembinaan angkutan barang
- 500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan

500.11.10 Monitoring Operasional
- 500.11.10.1 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

500.11.10.2 Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan

500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda

500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil

500.11.12 Pedoman Teknis

500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

500.11.11.3 Bimtek PPNS

500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

500.11.13 Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.13.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.13.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan

500.11.14 Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.14.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)

500.11.14.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalulintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.15 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.16 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.16.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan

500.11.16.2 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan

500.11.17 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.17.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.17.1 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan

500.11.17.2 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional

500.11.17.3 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.18 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.19 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.19.1 Manajemen lalu lintas
500.11.19.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
500.11.19.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau
500.11.19.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau

500.11.20 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.20.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
500.11.20.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
500.11.20.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.21 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.22 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.22.1 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional

500.11.23 Tarif dan Keperintisan

500.11.23.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.23.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan

500.11.24 Bina Sistem Transportasi Perkotaan

500.11.24.1 Jaringan Transportasi Perkotaan
500.11.24.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
500.11.24.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.25 Lalu Lintas Perkotaan

500.11.25.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
500.11.25.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
500.11.25.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah

500.11.26 Angkutan Perkotaan

500.11.26.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
500.11.26.2 Jaringan trayek perkotaan
500.11.26.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.27 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan

500.11.27.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang

500.11.27.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.27.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.28 Dampak Transportasi Perkotaan

500.11.28.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasanlingkungan

500.11.28.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan

500.11.28.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramahlingkungan

500.11.28.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasionaldalam kawasan kota

500.11.28.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan

500.11.28.6 Masterplan transportasi perkotaan

500.11.29 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan

500.11.29.1Monitoring dan evaluasi data kecelakaan

500.11.29.2 Kualifikasi unit pengkajian

500.11.29.3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan pengembangan Keselamatan

500.11.29.3 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.29.4 Harmonisasi kebijakan

500.11.30 Promosi dan Kemitraan Keselamatan

500.11.30.1 Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau

500.11.30.2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai,

500.11.31 Bina Keselamatan Angkutan Umum

500.11.31.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum

500.11.31.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungaidan danau

500.11.32 Audit Keselamatan

500.11.32.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumberdaya manusia

500.11.32.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.32.3 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

500.11.33 Inspeksi Keselamatan

500.11.33.1 Pedoman keselamatan

500.11.33.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.33.3 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

500.11.34 Parkir

500.11.34.1 Surat Tugas Juru Parkir

500.11.34.2 Izin tempat khusus parkir swasta

500.11.34.3 Surat Tugas TKP Pemerintah

**500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.12.2 Telekomunikasi

500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi

500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi

500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika

500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi

500.12.3 Penyiaran

500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi

500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi

500.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal

500.12.4.1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah

500.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah

500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran

500.12.4.4 Pelayanan Kewajiban Universal

500.12.4.5 Pengembangan Infrastruktur

500.12.5 Pengendalian Informatika

500.12.5.1 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi

500.12.5.2 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi

500.12.5.3 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran

500.12.5.4 Pencegahan dan Penertiban

500.12.6 e- Government
- 500.12.6.1 Tata Kelola e-Government
- 500.12.6.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Government
- 500.12.6.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
- 500.12.6.4 Aplikasi Layanan Kepemerintahan
- 500.12.6.5 Aplikasi Layanan Publik

500.12.7 e- Business
- 500.12.7.1 Tata Kelola e-Business
- 500.12.7.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Business
- 500.12.7.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
- 500.12.7.4 Aplikasi Layanan e-Busniness

500.12.8 Pemberdayaan Informatika Masyarakat
- 500.12.8.1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
- 500.12.8.2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan

500.12.9 Pemberdayaan Industri Informatika
- 500.12.9.1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
- 500.12.9.2 Industri Perangkat Informatika Pengguna
- 500.12.9.3 Industri Perangkat Lunak
- 500.12.9.4 Industri Konten Multimedia

500.12.10 Keamanan Informasi
- 500.12.10.1 Tata Kelola Keamanan Informasi
- 500.12.10.2 Teknologi Keamanan Informasi
- 500.12.10.3 Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
- 500.12.10.4 Penyidikan dan Penindakan
- 500.12.10.5 Budaya Keamanan Informasi

500.12.11 Komunikasi Publik
- 500.12.11.1 Tata Kelola Komunikasi Publik
- 500.12.11.2 Pengelolaan Opini Publik
- 500.12.11.3 Layanan Komunikasi Publik

500.12.12 Pengolahan dan Penyediaan Informasi
- 500.12.12.1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
- 500.12.12.2 Informasi Perekonomian
- 500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat

500.12.13 Pengelolaan Media Publik
- 500.12.13.1 Media Cetak
- 500.12.13.2 Media Online
- 500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual

500.12.14 Kemitraan Komunikasi
- 500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
- 500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha
- 500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi

500.12.15 Infrastruktur Informatika
- 500.12.15.1 Jaringan
- 500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
- 500.12.15.3 Keamanan Informatika

500.12.16 Sistem dan Data
- 500.12.16.1 Portal dan Konten
- 500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
- 500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi

500.12.17 Pusat Kerjasama
500.12.17.1 Kerja Sama daerah
500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
500.12.18.1 Pelayanan Informasi 500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
500.12.18.3 Bimbingan Teknis
500.12.19 Evaluasi

**500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata
500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata
500.13.2.3 Industri Pariwisata
500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
500.13.3 Pemasaran Pariwisata
500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri
500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri
500.13.3.4 Pencitraan Indonesia
500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman
500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa
500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK
500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
500.13.5.2 Desain dan Arsitektur
500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitasi
500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan
500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

**500.14 STATISTIK**

500.14.1 Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi

500.14.2.1 Perencanaan

500.14.2.2 Persiapan, antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba

500.14.2.3 Pelaksanaan Lapangan

500.14.2.4 Pengolahan, antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi

500.14.2.5 Analisis dan Penyajian Hasil Sensus

500.14.2.6 Diseminasi hasil sensus

500.14.3 Survei

500.14.3.1 Perencanaan

500.14.3.2 Persiapan

500.14.3.3 Pelaksanaan Lapangan, antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas

500.14.3.4 Pengolahan, antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner ), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi

500.14.3.5 Analisis dan Penyajian Hasil Survei, antara lain:
Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi

500.14.3.6 Diseminasi hasil Survei
500.14.4 Konsolidasil Data Statistik
500.14.4.1 Kompilasi Data
500.14.4.2 Analisis data
500.14.4.3 Penyusunan Publikasi
500.14.4.4 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan KonsolidasiData Statistik

**500.15 KETENAGAKERJAAN**

500.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PemerintahDaerah
500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja
500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi
500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas danKewirausahaan
500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
500.15.4 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
500.15.4.1 Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
500.15.4.4 Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.5 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
500.15.5.1 Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
500.15.5.2 Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
500.15.5.3 Tenaga Pelatihan
500.15.5.4 Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
500.15.6 Bina Pemagangan
500.15.6.1 Pemagangan Dalam Negeri
500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri
500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan
500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7 Produktivitas dan Kewirausahaan
500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas danKewirausahaan
500.15.7.2 Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan

500.15.8 Pengembangan Pasar Kerja
500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja
500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja
500.15.8.3 Bursa Kerja
500.15.8.4 Analisis Jabatan
500.15.9 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
500.15.9.1 Antar Kerja
500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus
500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja
500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya
500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna
500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.11 Standardisasi Profesi
500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi
500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi
500.15.12 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
500.15.12.2 Perjanjian Kerja
500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja
500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13 Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha
500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial
500.15.13.3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.14.1 Pengupahan
500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja
500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
500.15.16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja

500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
- 500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan
- 500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak
- 500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral
- 500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak

500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
- 500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran 500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
- 500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
- 500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3

500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan

500.15.20 Bina Penegakan Hukum
- 500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
- 500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
- 500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum

500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3
- 500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
- 500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
- 500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3

500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
- 500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
- 500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
- 500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
- 500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
- 500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
- 500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

**500.16 PENANAMAN MODAL**

500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
- 500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
- 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
- 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
- 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur

500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha
500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
500.16.4 Promosi Penanaman Modal
500.16.4.1 Pengembangan Promosi
500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi
500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
500.16.4.4 Promosi Sektoral
500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah
500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi
500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral
500.16.5.2 Kerja Sama Regional
500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal
500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal
500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah
500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal
500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal

500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal
500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi
500.16.7.2 Pelayanan Perijinan
500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan
500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan
500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas

**500.17 PERTANAHAN**

500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian

500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah

500.17.4 Sengketa Tanah
500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian

## 500.18 TRANSMIGRASI

500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
- 500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
- 500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
- 500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan
- 500.18.2.4 Advokasi Pertanahan

500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
- 500.18.3.1 Penyiapan Lahan
- 500.18.3.2 Penyiapan Sarana
- 500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
- 500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman

500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
- 500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
- 500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
- 500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
- 500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi

500.18.5 Partisipasi Masyarakat
- 500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
- 500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
- 500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
- 500.18.5.4 Pelayanan Investasi

500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
- 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
- 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
- 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
- 500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
- 500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan

500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
- 500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
- 500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
- 500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
- 500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi

500.18.8 Pengembangan Usaha
- 500.18.8.1 Kewirausahaan
- 500.18.8.2 Produksi
- 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
- 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan

500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
- 500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
- 500.18.9.2 Pengembangan Sarana
- 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
- 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana

500.18.10 Penyerasian Lingkungan
500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

**600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN**

**600.1 PEKERJAAN UMUM**

600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai
600.1.2.2 Kelembagaan
600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air
600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan
600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
600.1.3.2 Manajemen Mutu
600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air
600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman
600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air
600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai
600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa
600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
600.1.5.5 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur

600.1.7 Pengembangan Jaringan Jalan
600.1.7.1 Keterpaduan Perencanaan
600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan
600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600.1.8 Pembangunan Jalan
600.1.8.1 Standar dan Pedoman
600.1.8.2 Manajemen Konstruksi
600.1.8.3 Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
600.1.9 Preservasi Jalan
600.1.9.1 Standar dan Pedoman
600.1.9.2 Perencanaan Teknis
600.1.9.3 Teknik Rekonstruksi

600.1.9.4 Teknik Pemeliharaan Jalan

600.1.10 Pengelolaan Jembatan
- 600.1.10.1 Standar dan Pedoman
- 600.1.10.2 Perencanaan Teknis
- 600.1.10.3 Teknik Jembatan
- 600.1.10.4 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus

600.1.11 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
- 600.1.11.1 Bimbingan Teknik Jalan Daerah
- 600.1.11.2 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
- 600.1.11.3 Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan

600.1.12 Pengaturan Jalan Tol
- 600.1.12.1 Persiapan pengusahaan jalan tol
- 600.1.12.2 Pengadaan Investasi Jalan Tol
- 600.1.12.3 Teknik Pengaturan Jalan Tol
- 600.1.12.4 Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol

600.1.13 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
- 600.1.13.1 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
- 600.1.13.2 Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan

600.1.14 Pengembangan Kawasan Permukiman
- 600.1.14.1 Perencanaan Teknis
- 600.1.14.2 Kawasan Permukiman Perkotaan
- 600.1.14.3 Kawasan Permukiman Pedesaan
- 600.1.14.4 Kawasan Permukiman Khusus
- 600.1.14.5 Kelembagaan

600.1.15 Pembinaan Penataan Bangunan
- 600.1.15.1 Perencanaan Teknis
- 600.1.15.2 Penataan Bangunan Gedung
- 600.1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara
- 600.1.15.4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
- 600.1.15.5 Kelembagaan

600.1.16 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 600.1.16.1 Perencanaan Teknis
- 600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
- 600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
- 600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
- 600.1.16.5 Kelembagaan
- 600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan AirMinum
- 600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
- 600.1.17.1 Perencanaan Teknis
- 600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah
- 600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan
- 600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
- 600.1.17.5 Kelembagaan
- 600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi

**600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yangdilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
- 600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
- 600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
- 600.2.2.3 Kemitraan

600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
- 600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
- 600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan MikroPerumahan
- 600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan

600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
- 600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer
- 600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder
- 600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
- 600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan
- 600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan
- 600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan
- 600.2.5.2 Analisa Teknik
- 600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
- 600.2.5.4 Kemitraan dan Kelembagaan

600.2.6 Penyediaan Rumah Susun
- 600.2.6.1 Perencanaan Teknik
- 600.2.6.2 Penyediaan
- 600.2.6.3 Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
- 600.2.6.4 Pengelolaan

600.2.7 Penyediaan Rumah Khusus
- 600.2.7.1 Perencanaan Teknik
- 600.2.7.2 Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
- 600.2.7.3 Bimbingan teknis dan supervisi
- 600.2.7.4 Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
- 600.2.7.5 Perencanaan Teknik
- 600.2.7.6 Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak LayakHuni
- 600.2.7.7 Pelaksanaan Bantuan Simultan

600.2.8 Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
- 600.2.8.1 Perencanaan Teknik
- 600.2.8.2 Pemberian Bantuan Rumah Umum
- 600.2.8.3 Fasilitasi Hunian Berimbang
- 600.2.8.4 Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan

600.2.9 Investasi Infrastruktur
- 600.2.9.1 Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
- 600.2.9.2 Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
- 600.2.9.3 Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
- 600.2.9.4 Pasar Infrastruktur

600.2.10 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- 600.2.10.1 Sistem Penyelenggaraan

600.2.10.2 Kontrak Konstruksi
600.2.10.3 Konstruksi Berkelanjutan
600.2.10.4 Manajemen Mutu

600.2.11 Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
600.2.11.1 Kelembagaan
600.2.11.2 Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.11.3 Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
600.2.11.4 Usaha Jasa Konstruksi

600.2.12 Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
600.2.12.1 Standar dan Materi Kompetensi
600.2.12.2 Penerapan Kompetensi
600.2.12.3 Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
600.2.12.4 Pengembangan Produktivitas

600.2.13 Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.13.1 Peningkatan Kerjasama
600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi

600.2.14 Peningkatan Jasa Konstruksi
600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu

600.2.15 Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.2 Pengembangan Materi
600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi

600.2.16 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat(PUPR)
600.2.16.1 Antar Sektor
600.2.16.2 Antar Wilayah

600.2.17 Pengembangan Kawasan Strategis
600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis

600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan
600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan
Pedesaan
600.2.18.3 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
600.2.18.4 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)

600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi

**600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)**

600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah

600.3.2 Perencanaan

- 600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
- 600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
- 600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
- 600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
- 600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
- 600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota
- 600.3.2.7 Rencana Teknik Rencana Peremajaan dan Pengembangan

600.3.3 Pemanfaatan Prasarana Kota dan Pengendalian

- 600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
- 600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang
- 600.3.3.3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang

600.3.4 Pemetaan

- 600.3.4.1 Peta Dasar
- 600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat
- 600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air

**600.4 LINGKUNGAN HIDUP**

600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
- 600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor

- 600.4.3.1 Evaluasi Penerapan
- 600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup

600.4.4 Ekonomi Lingkungan

600.4.5 Dampak Lingkungan

- 600.4.5.1 Bimtek Dampak Lingkungan
- 600.4.5.2 Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
- 600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut

600.4.6 Pemantauan dan Pengawasan

- 600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa
- 600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
- 600.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
- 600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak

600.4.7 Evaluasi dan Pengembangan
- 600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana dan Jasa
- 600.4.7.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
- 600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
- 600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak

600.4.8 Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
- 600.4.8.1 Pengembangan
- 600.4.8.2 Pemanfaatan
- 600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik
- 600.4.8.4 Keamanan Hayati
- 600.4.8.5 Pengendalian kerusakan Lahan

600.4.9 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
- 600.4.9.1 Kerusakan Ekosistem

600.4.10 RawaMitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
- 600.4.10.1 Perangkat mitigasi
- 600.4.10.2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
- 600.4.10.3 Pengendalian Bahan Perusak Ozon
- 600.4.10.4 Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan danLahan

600.4.11 Adaptasi Perubahan Iklim
- 600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
- 600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim

600.4.12 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- 600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi
- 600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
- 600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut

600.4.13 Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
- 600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan
- 600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan
- 600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping
- 600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas

600.4.14 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
- 600.4.14.1 Pemantauan
- 600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi

600.4.15 Pengelolaan Sampah
- 600.4.15.1 Pembatasan sampah
- 600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
- 600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura
- 600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura

600.4.16 Hukum Administrasi Lingkungan
- 600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
- 600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan

600.4.17 Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- 600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
- 600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan

600.4.18 Penegakan hukum pidana lingkungan
- 600.4.18.1 Penyidikan

600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600.4.19 Komunikasi Lingkungan
600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi
600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye
600.4.20 Penguatan Inisiatif Masyarakat
600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan
600.4.20.2 Kearifan Lingkungan
600.4.21 Peningkatan Peran Masyarakat
600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan
600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan
600.4.22 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat
600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha
600.4.23 Data dan Informasi Lingkungan
600.4.23.1 Pengelolaan Data
600.4.23.2 Pengelolaan Informasi
600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak
600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
600.4.24 Kelembagaan Lingkungan
600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana
600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
600.4.25 Standarisasi dan teknologi
600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga PenyediaJasa Lingkungan
600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan

600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas LIngkungan
600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian

## 700 PENGAWASAN

### 700.1 PENGAWASAN INTERNAL

700.1.1 Rencana Pengawasan
700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
700.1.1.3 Rencana Kinerja TahunanRencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
700.1.1.4 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan
700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindaklanjut (TL)

700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung
unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindaklanjut
700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
700.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
700.1.2.9 Good Corporate Governance (GCG)

**800 KEPEGAWAIAN**

**800.1 SUMBER DAYA MANUSIA**

800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan
800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi, antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.4 Standarisasi Jabatan, antara lain: Informasi Jabatan,

800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai

800.1.2.1 Formasi ASN, antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
800.1.2.2 Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN, antara lain: Proses
Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN
800.1.2.4 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
800.1.2.5 Pengangkatan ASN
800.1.2.6 Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)
800.1.2.7 Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
800.1.2.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN

800.1.3 Mutasi Pegawai

800.1.3.1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasiantar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN

800.1.3.2 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
800.1.3.3 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
800.1.3.4 Perubahan Data Dasar/ Status/Kedùdukan Hukum Pegawai
800.1.3.5 Peninjauan Masa Kerja
800.1.3.6 Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)

800.1.4 Pengembangan Karir
800.1.4.1 Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
800.1.4.2 Penyesuaian ijazah
800.1.4.3 Penyusunan Sistem Karier
800.1.4.4 Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
800.1.4.5 Angka Kredit, antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit

800.1.5 Kinerja Aparatur Sipil Negara
800.1.5.1 Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
800.1.5.2 Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
800.1.5.3 Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja

800.1.6 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN

800.1.6.1 Kode Etik Pegawai
800.1.6.2 Disiplin
800.1.6.3 Pemberhentian Dengan Hormat
800.1.6.4 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
800.1.6.5 Pemberhentian Sementara
800.1.6.6 Pensiun ASN, antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya

800.1.7 Bantuan Hukum
800.1.8 Status dan Kedudukan Pegawai
800.1.8.1 Status Kepegawaian
800.1.8.2 Kedudukan Kepegawaian
800.1.8.3 Keberatan Pegawai
800.1.8.4 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian

800.1.9 Sistem Informasi Kepegawaian
800.1.9.1 Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
800.1.9.2 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
800.1.9.3 Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik
800.1.9.4 Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik

800.1.10 Pengawasan dan pengendalian
- 800.1.10.1 Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
- 800.1.10.2 Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian DalamJabatan
- 800.1.10.3 Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
- 800.1.10.4 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
- 800.1.10.5 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
- 800.1.10.6 Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer

800.1.11 Administrasi Pegawai
- 800.1.11.1 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
- 800.1.11.2 Cuti Sakit
- 800.1.11.3 Cuti Bersalin
- 800.1.11.4 Cuti Tahunan
- 800.1.11.5 Cuti Alasan Penting
- 800.1.11.6 Cuti Besar
- 800.1.11.7 Cuti Di luar Tanggungan Negara
- 800.1.11.8 Karpeg/KPE/Karis/Karsu
- 800.1.11.9 Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
- 800.1.11.10 Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
- 800.1.11.11 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai(KP4)
- 800.1.11.12 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- 800.1.11.13 Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan

800.1.12 Kesejahteraan Pegawai
- 800.1.12.1 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
- 800.1.12.2 Asuransi Pegawai/BPJS
- 800.1.12.3 Tabungan Perumahan
- 800.1.12.4 Bantuan Sosial
- 800.1.12.5 Pakaian Dinas
- 800.1.12.6 Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
- 800.1.12.7 Pemberian Tali Kasih
- 800.1.12.8 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
- 800.1.12.9 Olahraga dan Rekreasi
- 800.1.12.10 Rekam Medis

800.1.13 Administrasi Perseorangan
- 800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 800.1.13.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- 800.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
- 800.1.13.4 Sekretaris Daerah
- 800.1.13.5 ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional

800.1.14 Penilaian Kompetensi
800.1.14.1 Penilaian Kompetensi
800.1.14.2 Hasil Penilaian Kompetensi

**800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

800.2.1 Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah

800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan
800.2.2.1 Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan
800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat
800.2.2.4 Modul-modul diklat
800.2.2.5 Panduan fasilitator
800.2.2.6 Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
800.2.2.7 Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
800.2.2.8 Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
800.2.2.9 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat

800.2.3 Widyaiswara
800.2.3.1 Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
800.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara
800.2.3.3 Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
800.2.3.4 Penilaian Widyaiswara
800.2.3.5 Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
800.2.3.6 Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara

800.2.4 Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan
800.2.4.2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.3 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
800.2.4.4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
800.2.4.5 Sistem informasi diklat
800.2.4.6 Monitoring Penyelenggara Diklat
800.2.4.7 Monitoring dan evaluasi Pasca diklat

800.2.5 Alumni

**900 KEUANGAN**

**900.1 KEUANGAN DAERAH**

900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)
900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan

900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)

900.1.2 Penyusunan Anggaran

900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan

900.1.2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota

900.1.2.3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah

900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

900.1.3 Pelaksanaan Anggaran

900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS

900.1.3.2 Pendapatan

900.1.3.3 Belanja

900.1.3.4 Pembiayaan Daerah

900.1.3.5 Dokumen Penatausahaan Keuangan

900.1.3.6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

900.1.3.7 Daftar Gaji

900.1.3.8 Kartu Gaji

900.1.3.9 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)

900.1.3.10 Laporan Keuangan

900.1.4 Pinjaman/Hibah Luar Negeri

900.1.4.1 Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)

900.1.4.2 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai(Green Book)

900.1.4.3 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya

900.1.4.4 Dokumen Loan Agremeent (PHLN), antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender

900.1.4.5 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antaralain: Usulan Luncuran Dana

900.1.4.6 Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya

900.1.4.7 Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)

900.1.4.8 Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya (SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya)

900.1.4.9 Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara

Donor), antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)

900.1.4.10 Staff Appraisal Report

900.1.4.11 Report /Laporan

900.1.4.12 Laporan Hutang Daerah

900.1.4.13 Completion Report/Annual Report

900.1.4.14 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah LuarNegeri

900.1.5 Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

900.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

900.1.6.1 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah(SAKD)

900.1.6.2 Dokumen Kebijakan Akuntansi

900.1.6.3 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi

900.1.6.4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran

900.1.7 Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan

900.1.7.1 Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan

900.1.7.2 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya, antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

900.1.7.3 Buku Rekening Bank

900.1.7.4 Keputusan Pembukuan Rekening

900.1.7.5 Pembukuan anggaran, antara lain: Buku Kas Umum (BKU),Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran

900.1.8 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan

900.1.8.1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya

900.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda

Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

900.1.9 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD ,
antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan

900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
- 900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
- 900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan
  Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
- 900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
- 900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya

900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
- 900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
- 900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
- 900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
- 900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah

900.1.12 Anggaran Daerah
- 900.1.12.1 Anggaran Daerah
- 900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah

900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah

900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah

900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah

900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah

900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah

900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah, antara lain: Fasilitas pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerahi

900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan

900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum

900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus

900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaanmonitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya ;

900.1.14.4 Dukunga Fasilitasi Dana Perimbangan, antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan

900.1.15 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

900.1.15.1 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.2 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah,
Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah

| | |
|---|---|
| 900.1.15.3 | Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah |
| 900.1.15.4 | Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS